

**BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM): STUDI DESKRIPTIF
PENDAPATAN PEDAGANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN BOGOR**

Veni Deviyanti¹ Siti Hajar^{2*} Deradjat Mahadi Sasoko³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Wabah Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap pelaku usaha kecil menengah. Banyak dari pelaku usaha kecil menengah mengalami kerugian, dan berdampak kepada kondisi pendapatan yang tidak stabil, sehingga mengakibatkan terpuruknya perekonomian para pelaku usaha kecil menengah. Salah satunya di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, banyak pelaku usaha kecil menengah yang perekonomiannya mengalami ketepurukan selama masa pandemi Covid-19. Maka dari itu Pemerintah membuat program Bantuan Produktif Usaha Mikro yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa apabila dalam pelaksanaan BPUM terhadap pelaku UMKM berjalan cukup baik dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku UMKM, tentunya juga untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan modal produksi sampai inovasi yang dilakukan agar terus mendapatkan penghasilan pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: BPUM, Pendapatan, UMKM, Covid-19

Abstract

The Covid-19 outbreak has had an impact on small and medium businesses. Many small and medium business actors experience losses, and this has an impact on unstable income conditions, resulting in a downturn in the economy of small and medium business actors. One of them is in Cibinong District, Bogor Regency, where many small and medium businesses experienced a downturn during the Covid-19 pandemic. Therefore the Government created a Micro Business Productive Assistance program aimed at Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The research results show that if the implementation of BPUM for MSME actors goes quite well and has a significant impact on MSME actors, of course it is also to help MSME players increase production capital to innovations that are carried out so that they continue to earn income during the Covid-19 pandemic.

Keywords: BPUM, Income, MSMEs, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membawa dampak pada berbagai sektor, salah satunya sektor perekonomian. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mene-

ngah (selanjutnya disingkat (UKM), terdapat sekitar 37.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) yang terdampak sangat serius diakibatkan adanya pandemi yaitu sekitar 56% melaporkan terjadi penu-

© 2023 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: sitihajarsantoso@jayabaya.ac.id

Received 16 July 2023, Accepted 22 July 2023, Published 27 July 2023

runan penjualan, 22% permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% masalah distribusi barang dan 4% kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Desda, 2021).

Menurut Sanjaya dan Sari (2021) yang mengutip data riset Kementerian Koperasi dan UKM, jenis UMKM yang terdampak diantaranya pedagang besar dan kecil (40,92%), penyedia jasa akomodasi, makanan dan minuman (26,86%), dan industri pengelolaan (14,25%). Sebagai sektor yang menyumbang kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi nasional terutama dalam kondisi krisis ekonomi.

Dalam mengatasi kondisi tersebut di atas, pemerintah melakukan berbagai upaya pengambilan kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian langkah atau tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks, terutama ketika ada tantangan dan potensi, dengan tujuan mengatasi kendala dan peluang yang ada, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan (Alkadafi, 2014; Mahbubi *et al.*, 2014; Basyar *et al.*, 2015). Kebijakan publik sebagai keputusan yang ditandai oleh konsistensi dan pengulangan perilaku dari para pembuat keputusan dan pihak yang mematuhi keputusan tersebut (Kadir, 2020), apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Hall & Jenkins, 2004), yang didesain untuk mencapai hasil tertentu (Bakry, 2010; Novendasyarizky & Taufiq, 2014; Rante & Mutiarin, 2016; Putri *et al.*, 2017; Reski, 2018; Tumbel, 2021; Purba *et al.*, 2022; Sahlania & Mana, 2023).

Kebijakan pemerintah yang memberikan solusi kepada UMKM untuk mengatasi perekonomian akibat Covid-19 diantara-

nya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi (khususnya sektor UMKM). Salah satu skema program bantuan bagi UMKM yakni program Bantuan Produktif Usaha Mikro (selanjutnya disebut BPUM) yang didasarkan pada petunjuk pelaksanaan BPUM Nomor 98 Tahun 2020 dengan tujuan membantu UMK dalam menjalankan usahanya pada saat krisis akibat pandemi Covid-19.

Untuk memenuhi syarat mendapatkan BPUM, pemilik usaha harus menjadi Warga Negara, memiliki Nomor Induk Kependudukan, memiliki usaha mikro yang telah diverifikasi dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM. Selain itu, mereka tidak boleh termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN atau BUMD, dan juga tidak boleh memiliki saldo di rekening Bank lebih dari Rp 2.000.000,- serta tidak terdaftar sebagai nasabah dengan kredit di Bank. Setelah memenuhi kriteria tersebut, pemilik usaha dapat mengajukan berkas berupa KTP, Kartu Keluarga, Foto usaha, dan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa.

BPUM diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) dan diberikan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tahun 2020, kepada 12 juta UMKM yang saat ini tidak mendapatkan bantuan dari sumber manapun. Penelitian ini memiliki kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program

BPUM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor. Berbagai penelitian yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah penelitian Subekti (2013), Syarifah (2021), dan Latifah (2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Fathoni, 2006; Fadli, 2021). Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas BPUM bagi UMKM Kabupaten Bogor. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hasil wawancara, pengamatan, serta dokumen dan arsip. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan 20 pelaku UMKM dan Dinas Koperasi UMKM sebagai Nasumber.

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki validitas sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan beberapa uji keabsahan data. Uji-ujinya meliputi: (1) Uji kredibilitas (*credibility*): Menguji sejauh mana data yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat. Ini dapat mencakup memverifikasi keakuratan hasil wawancara atau observasi dengan partisipan atau sumber lain. (2) Uji transferabilitas (*transferability*): Memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau diadopsi dalam konteks lain atau dengan subjek yang serupa. Hal ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya relevan dalam kasus yang diteliti, tetapi juga dapat memberikan wawasan bagi situasi yang serupa. (3) Uji dependabilitas (*dependability*): Menilai konsistensi dan kestabilan data selama penelitian. Penting untuk memastikan bahwa proses penelitian yang dilakukan dapat diulang dan hasil yang diperoleh konsisten. (4) Uji *confirmability*

(*confirmability*): Mengevaluasi sejauh mana interpretasi peneliti dapat diverifikasi oleh data yang ada. Uji ini menjamin bahwa hasil penelitian berasal dari data yang diperoleh dan bukan dari pendapat atau prasangka peneliti (Soendari, 2012; Wijayanti *et al.*, 2012; Andriani, 2015). Dengan melakukan uji-ujian keabsahan data ini, penelitian kualitatif dapat dianggap lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yang tidak melibatkan metode statistik (Zellatifanny *et al.*, 2018; Adlini *et al.*, 2022). Data-data tersebut dikelompokkan untuk mempermudah proses penyaringan, memisahkan antara data yang relevan dan data yang tidak relevan. Setelah pengelompokan data selesai, penulis menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan agar mudah dipahami. Dari hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan jawaban atas permasalahan utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dihadapkan pada berbagai tantangan selama pandemi COVID-19. Beberapa langkah yang umum diambil oleh pelaku usaha UMKM untuk menghadapi situasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengadopsi model bisnis online: Banyak pelaku usaha UMKM beralih ke *platform online* untuk menjual produk mereka. Mereka memanfaatkan media sosial, *platform e-commerce*, atau membangun situs web mereka sendiri. Dengan adopsi model bisnis *online*, mereka dapat tetap beroperasi dan menjangkau konsumen meski-

pun ada pembatasan fisik dan pembatasan mobilitas.

2. Inovasi produk atau layanan: Beberapa pelaku usaha UMKM mencoba mengubah atau menyesuaikan produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang muncul selama pandemi. Misalnya, beberapa perusahaan garmen beralih untuk memproduksi masker kain, atau restoran mengadopsi layanan pesan antar atau *take-away*.
3. Kolaborasi dengan pelaku usaha lain: Banyak pelaku usaha UMKM melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha lain dalam upaya meningkatkan visibilitas dan daya jual produk mereka. Ini bisa berupa kolaborasi promosi bersama, paket penawaran bersama, atau menggabungkan sumber daya untuk memperluas jangkauan pasar.
4. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan pemasaran digital: Pelaku usaha UMKM aktif menggunakan media sosial dan strategi pemasaran digital lainnya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran tentang produk atau layanan mereka. Mereka memanfaatkan *platform* seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, dan lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk, dan menjalankan kampanye pemasaran yang relevan dengan situasi pandemi.
5. Memanfaatkan bantuan pemerintah dan program stimulus ekonomi: Di banyak negara, pemerintah menyediakan berbagai program bantuan dan stimulus ekonomi untuk mendukung pelaku usaha UMKM selama pandemi. Pelaku usaha UMKM aktif

mencari informasi tentang program-program ini dan menerapkannya untuk memperoleh bantuan keuangan tambahan atau manfaat lain yang ditawarkan.

6. Mengurangi biaya operasional: Pelaku usaha UMKM juga mencoba mengurangi biaya operasional mereka selama pandemi. Mereka melakukan evaluasi pengeluaran dan mencari cara untuk menghemat biaya, seperti menegosiasikan kontrak dengan pemasok, memotong biaya *overhead* yang tidak perlu, atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
7. Beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan protokol kesehatan: Pelaku usaha UMKM harus terus memantau perubahan kebijakan dan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Mereka berusaha untuk mematuhi aturan-aturan ini dan menyesuaikan operasional mereka agar sesuai dengan tuntutan keadaan.

Semua langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha UMKM bertahan selama pandemi Covid-19 dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Meskipun tantangan yang dihadapi berat, beberapa UMKM mampu bertahan dan bahkan berkembang dengan mengambil langkah-langkah adaptasi yang tepat.

Pemerintah sering mengadopsi kebijakan dan program bantuan yang bertujuan untuk mendukung pelaku usaha UMKM. Beberapa kebijakan yang umum dilakukan oleh pemerintah untuk membantu UMKM antara lain:

1. Akses keuangan: Pemerintah biasanya memberikan akses yang lebih mudah ke pembiayaan bagi UMKM

melalui program kredit mikro, bantuan modal usaha, atau program pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk membantu UMKM mengatasi kendala likuiditas dan mendukung pertumbuhan usaha mereka.

2. Pelatihan dan pendidikan: Pemerintah sering menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan khusus bagi pelaku usaha UMKM. Program ini mencakup pelatihan keterampilan manajerial, pemasaran, keuangan, teknologi, dan inovasi. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, diharapkan UMKM dapat lebih kompetitif dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.
3. Akses pasar dan promosi: Pemerintah dapat membantu UMKM mengakses pasar yang lebih luas dengan memfasilitasi partisipasi dalam pameran, festival, atau acara khusus. Selain itu, mereka juga dapat memberikan dukungan dalam hal promosi produk UMKM melalui *platform online* atau *offline*.
4. Pengurangan birokrasi dan perizinan: Untuk memudahkan UMKM, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan usaha. Ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan iklim usaha bagi UMKM.
5. Perlindungan hukum dan kebijakan pajak: Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi kepentingan UMKM dalam hal hukum dan perpajakan. Ini mencakup pengaturan tentang perlindungan

merek, paten, hak cipta, serta kebijakan perpajakan yang menguntungkan UMKM.

Perlu dicatat bahwa setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda terkait dengan bantuan bagi UMKM. Oleh karena itu, informasi yang lebih spesifik dan terkini dapat ditemukan melalui sumber resmi pemerintah setempat atau lembaga terkait yang mengurus UMKM.

Dari berbagai hasil wawancara beberapa pelaku usaha UMKM di Kecamatan Cibinong yaitu Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Ciriung, Kelurahan Citareup, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pertama, Dampak yang dirasakan oleh Ibu N sebagai pemilik Warung Tegal sangat signifikan dari jam operasional, peraturan pembatasan kegiatan terutama penghasilan atau untung yang didapat. Bapak L selama pandemi pedagang sayur mengalami kesulitan karena barang yang dijual mudah layu dan busuk serat minat pembeli juga mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kerugian pada pemilik usaha. Bagi Ibu R O sebagai penjual Gas eceran dampak yang dirasakan tidak terlalu signifikan dikarenakan gas adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat terlebih saat Covid-19 yang dimana kegiatan lebih banyak dilakukan didalam rumah. Bapak N Y mengatakan bahwa usaha warung kopi yang ada pada kelurahan pabuaran ini tidak ada dampak yang berarti bagi usaha yang dijalani, karena lokasi tempat warung kopi tersebut terletak ditengah-tengah desa yang jauh dari jalan lalu lintas besar, sehingga para masyarakat tetap datang untuk minum kopi.

Kedua, dari aspek laba UMKM, besar laba keuntungan pelaku usaha yang diperoleh baik sebelum terdampak pandemi covid-19 maupun setelah terdampak pandemi covid-19 untuk labanya sendiri memiliki bermacam variasi tersendiri, ada yang laba keuntungannya stabil atau tetap dan ada juga yang laba keuntungannya menurun (hasil wawancara dengan Bapak T W sebagai pemilik usaha *foto copy*, Ibu R D sebagai pemilik usaha toko baju). Sedangkan bagi sebagian pelaku UMKM, di tengah Covid-19 memiliki laba yang meningkat, seperti Bapak S (pemilik toko alat-alat kesehatan), Ibu D (pemilik usaha *frozen food*), dan Bapak F E (penjual pulsa).

Ketiga, dari aspek kondisi pendapatan pelaku usaha. Secara umum pendapatan yang dirasakan oleh pelaku usaha berbeda-beda, ada pendapatannya stabil (tetap) dan ada pendapatannya menurun (berkurang), faktor menurunnya pendapatan para pelaku usaha ini sebagian dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga pemasukan/pendapatan pelaku usaha berpengaruh. Kemudian konsumen sebagian juga merasakan dampak yang sama pada masa pandemi covid-19 ini, sehingga masyarakat juga terdampak terhadap ekonomi mereka (hasil wawancara dengan Bapak W Y sebagai pemilik usaha rumahan dan Ibu N W sebagai pemilik usaha perabotan rumah tangga).

Keempat, dari aspek tingkat daya beli masyarakat. Bagi pelaku UMKM, ada yang kondisinya menurun (tidak stabil) dan ada juga kondisinya yang tetap (stabil). Faktor yang menyebabkan sebagian tingkat daya beli masyarakat berkurang adalah karena sebagian masyarakat sudah mendapatkan sembako dari pemerintah atau dari desa sehingga

masyarakat tidak lagi berbelanja keperluan rumah tangga dari pelaku usaha tersebut. Kemudian faktor selanjutnya yaitu dikarenakan masyarakat juga mengalami kurangnya penghasilan yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19. Tingkat daya beli menurun sangat dirasakan bagi para sebagian pelaku usaha dibagian usaha warung/kios yang menjual jajanan anak-anak (hasil wawancara dengan Ibu W W sebagai pemilik warung nasi rumahan).

Kelima, dari aspek inovasi yang dilakukan pelaku UMKM. Selama pandemi COVID-19, pelaku usaha UMKM telah melakukan berbagai inovasi untuk bertahan dan beradaptasi dengan situasi yang berubah seperti penjualan *online* dan pemasaran *digital*, pengiriman dan layanan pengambilan sendiri, inovasi produk layanan, kolaborasi dan kemitraan, pelatihan dan peningkatan keahlian, serta penggunaan teknologi. Inovasi-inovasi tersebut membantu UMKM untuk tetap bertahan dan terus beroperasi selama pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa inovasi tersebut mungkin terus berlanjut dan menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang mereka setelah pandemi berakhir (hasil wawancara dengan Bapak A A sebagai penjual *snack* kering dan Ibu W W sebagai penjual masakan rumahan)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha, ada sebagian dari mereka menggunakan BPUM untuk penambahan modal usaha dan ada sebagian digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti membeli kebutuhan pokok dan memberikan uang jajan kepada anak mereka selama masa pandemi. Pengaruh yang dihasilkan dari BPUM yang dirasakan oleh masyarakat sangat membantu baik secara usaha

maupun kebutuhan lainnya. BPUM ini juga memberikan pengaruh pada para pelaku usaha UMKM yang terkena dampak pandemi. Dengan adanya BPUM ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dan masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat akibat kesulitan ekonomi yang dialami selama terjadinya pandemi Covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BPUM yang diberikan oleh pemerintah sudah memberikan dampak yang cukup bagus untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Akan tetapi kebijakan ini juga memberikan dampak negatif pada pelaku usaha yang memang usahanya tidak menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat pada masa pandemi Covid-19 saat itu.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan dalam penelitian adalah: *Pertama*, Dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Salah satu dampak yang terjadi adalah penurunan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, dengan penurunan rata-rata sebesar 50%. Banyak dari mereka menghadapi kerugian dan kekurangan pendapatan dalam usaha mereka. Selama pandemi Covid-19, kondisi laba juga mengalami penurunan bagi pelaku usaha, sehingga hal ini berdampak pada perekonomian dan kehidupan mereka. Tingkat daya beli masyarakat pada pelaku usaha kecil menengah juga mengalami fluktuasi yang signifikan selama masa pandemi Covid-19.

Kedua, Program bantuan bagi UMKM memiliki dampak yang signifikan bagi para pedagang dan pelaku usaha kecil menengah di Kecamatan Cibinong. BPUM memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi para pelaku usaha dengan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menghindari penurunan taraf kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi. BPUM juga memberikan manfaat lain bagi pelaku usaha, seperti bantuan untuk kebutuhan pokok dan peningkatan modal usaha. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi dan mengembangkan usaha mereka, yang pada akhirnya akan membantu dalam pemulihan kondisi ekonomi mereka.

REFERENSI

- Adlini, M.N., Dinda, A.H., Yulinda, S., Chotimah, O. and Merliyana, S.J., 2022. Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), pp.974-980.
- Alkadafi, M., 2014. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), pp.32-40.
- Andriani, S., 2015. Evaluasi CSE-UCLA pada studi proses pembelajaran matematika. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(2), pp.167-176.
- Bakry, A., 2010. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), pp.1-13.
- Basyar, B., Hartono, B., Rohaeni, E.S. and Rahmi, E., 2015. Makalah Bidang

- Sosial Ekonomi. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Agribisnis Peternakan (STAP)*, 3, pp. 378-516.
- Desda, M.M., 2021. Pandemi Covid-19 dampaknya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di pasaman barat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 2(1), pp.31-37.
- Fadli, M.R., 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), pp.33-54.
- Fathoni, A., 2006. *Metodelogi Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Hall, C.M. and Jenkins, J., 2004. Tourism and public policy. *A companion to tourism*, pp.523-540.
- Kadir, A., 2020. Fenomena Kebijakan Publik Dalam perspektif Administrasi Publik Di Indonesia. CV. *Dharma Persada*.
- Latifah, N., 2021. *Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Mahbubi, A., Rosyad, A. and Nur, Y.S., 2014. Makalah Bidang Komisi C. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Agribisnis Peternakan (STAP)*, 2, pp. 242-407.
- Novendasyarizky, H. and Taufiq, A., 2014. Evaluasi Kebijakan Penataan Pasar Johar, Pasar Bulu Dan Pasar Jatingaleh. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(2), pp.96-105.
- Purba, H.S.H., Sinaga, K. and Siregar, F.A., 2022. Peranan Aplikasi E-Kinerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemko Medan). *Publik Reform*, 9(1), pp.26-33.
- Putri, D.A., Dengo, S. and Londa, V., 2017. Efektivitas Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Di Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046), pp. 1-8
- Rante, H. and Mutiarin, D., 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Morangan Sleman DIY. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1), pp. 1-20
- Reski, K., 2018. Urgensi Nilai-Nilai Public Service Motivation Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 1(1), pp.24-31.
- Sahlania, O. and Mana, R., 2023. Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Laika Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 14(1), pp.22-29.
- Sanjaya, T.A.F. and Sari, R.P., 2021, May. Analisis Ketahanan UMKM di Sidoarjo dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Menggunakan OODA Loop. In *Seminar Nasional*

Akuntansi dan Call for Paper
(SENAPAN), 1(1), pp. 233-245.

- Soendari, T., 2012. *Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif*. Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Subekti, L., 2013. *Implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (studi pada dinas koperasi dan UKM kota malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Syarifah, E., 2021. *Efektivitas Penyaluran dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Desa Melayu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Tumbel, R., Kiyai, B. and MAMBO, R., 2021. Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110), pp. 79-92
- Wijayanti, A.W., Muluk, M.R.K. and Nurpratiwi, R., 2012. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 15(3), pp.10-17.
- Zellatifanny, C.M. and Mudjiyanto, B., 2018. Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), pp.83-90.